



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR : 3 TAHUN 1995 SERI B NO.SERI 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI
OBYEK WISATA DI KAB. DATI II HSS



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 3 Tahun 1995 Seri B No.Seri 2
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 1995
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan sektor Kepariwisata di Daerah dalam penanganan dan pengembangan obyek-obyek wisata yang ada, perlu diadakan pembinaan yang terarah dalam upaya untuk mewujudkan kawasan wisata ;
- b. bahwa untuk pembinaan obyek-obyek wisata dimaksud perlu adanya sumber dana yang memadai, untuk ini perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Obyek Wisata adalah berupa ciptaan Tuhan maupun hasil karya dan budaya manusia serta tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
- f. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi tempat rekreasi dan hiburan umum serta dapat mempergunakan semua jasa dan fasilitas yang disediakan ;
- g. Izin Pengelolaan adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk pengelola Obyek Wisata ;

- h. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap pengunjung dan atau kendaraan yang memasuki Obyek Wisata atau mereka yang memanfaatkan tempat untuk usaha dalam lokasi Obyek Wisata ;
- i. Kontribusi adalah pembayaran umum yang dilakukan oleh Pengelola Obyek Wisata selain Pemerintah Daerah.

B A B II OBYEK WISATA

Pasal 2

- (1) Obyek Wisata di Daerah adalah :
 - a. Pemandian Alam Kota Loksado ;
 - b. Sumber Air Panas Bumi Tanuhi ;
 - c. Air Terjun Haratai ;
 - d. Goa Berangin Gunung Batu Laki (Malutu Permai);
 - e. Goa Mandala / Mandala Permai ;
 - f. Goa Batu Bini dan Sumber Air Panas ;
 - g. Riam Sarajung dan Riam Anai ;
 - h. Kawasan Kerbau Rawa ;
 - i. Riam Lokbahan ;
 - j. Air Terjun Mandiu Tangkaramin (Malinau).
- (2) Selain Obyek Wisata tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Batas lokasi masing-masing Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B III PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 4

- (1) Obyek-obyek wisata dalam Daerah, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan Obyek Wisata dilaksanakan dan diawasi oleh Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Selain dari Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pengelolaan Obyek Wisata dapat juga dilakukan oleh pengusaha/perusahaan perorangan atau Badan Hukum setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka bagi yang berminat untuk mengelola suatu Obyek Wisata harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengajuan izin dimaksud ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B IV

RETRIBUSI OBYEK WISATA DAN KONTRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pengunjung dan kendaraan yang memasuki Obyek Wisata sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi.
- (2) Selain retribusi yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, setiap pengunjung yang menggunakan/menikmati sarana/fasilitas dan menggunakan tempat untuk usaha pada kawasan Obyek Wisata wajib membayar retribusi

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi untuk setiap kali masuk Obyek Wisata sebagai berikut :
- a. Setiap orang/pengunjung wisatawan nusantara ;
- | | | |
|----------------|----|--------|
| 1. Anak - anak | Rp | 100, - |
| 2. Dewasa | Rp | 200, - |

- b. Setiap orang/pengunjung wisatawan manca negara Rp 1.000,-
- c. Setiap sepeda Rp 100,-
- d. Setiap sepeda motor semua jenis Rp 200,-
- e. Setiap kendaraan bermotor roda 4 dan sejenisnya Rp 1.000,-
- f. Setiap kendaraan bermotor roda 6 dan sejenisnya Rp 1.500,-
- (2) Besarnya retribusi harian pengguna tempat kegiatan usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap penjaja barang dagangan Rp 100,-
 - b. Setiap penjaja jasa Rp 100,-
 - c. Setiap pemakaian los/bangunan per meter. Rp 50,-

Pasal 8

- (1) Pengunjung yang masuk Obyek Wisata secara rombongan dengan menggunakan kendaraan bermotor dikenakan retribusi secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setiap sedan, jeep, minicap dan sejenisnya Rp 1.500,-
 - b. Kendaraan bermotor penumpang - dengan kapasitas 8 orang Rp 2.000,-
 - c. Setiap bus dan sejenisnya ;
 - 1.dengan kapasitas 9 s/d 27 orang Rp 5.000,-
 - 2.dengan kapasitas 28 s/d 42 orang Rp 7.500,-
 - 3.dengan kapasitas 43 s/d 56 orang Rp 10.000,-
- (2) Bagi pengunjung/wisatawan nusantara yang masuk Obyek Wisata secara rombongan dengan menggunakan kendaraan bermotor dikenakan retribusi kolektif sebesar 75 % dari ketentuan ayat (1) pasal ini.
- (3) Retribusi kolektif dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dapat dikenakan apabila setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi dimaksud ayat (3) pasal ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Bagi pengunjung Obyek Wisata secara rombongan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor dapat dikenakan retribusi secara kolektif sebesar 75 % dari ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini apabila setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

Pasal 10

Pengecualian dari ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi pengelola Obyek Wisata yang diberi izin sesuai pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Kontribusi.
- (2) Besarnya Kontribusi dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi pengelola Obyek Wisata yang sarana dan prasarananya milik sendiri dikenakan sebesar 25 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - b. Bagi pengelola Obyek Wisata milik Pemerintah Daerah termasuk sarana dan prasarananya, dikenakan sebesar 60 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - c. Bagi pengelola Obyek Wisata milik Pemerintah Daerah tetapi sarana dan prasarananya merupakan milik pengelola sendiri dikenakan sebesar 40 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.
 - d. Bagi pengelola Obyek Wisata milik pihak ketiga yang status haknya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan sarana dan prasarananya menjadi tanggungjawab pengelola, dikenakan

sebesar 45 % dari nilai nominal retribusi tanda masuk Obyek Wisata yang berlaku sesuai pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pengelola Obyek Wisata sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Penyerahan hak dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, dapat diberikan uang jasa atau ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan pemegang hak dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi dan kontribusi seperti dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata atau badan lain yang ketentuan pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan retribusi Obyek Wisata maupun kontribusi dimaksud pasal 7, 8, 9 dan 11 Peraturan Daerah ini harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 9 dan pasal 11 ayat (2) Peraturan

Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh seseorang tersangka berhenti dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara sebagai tindakan :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Penyitaan benda ;
 - c. Pemeriksaan rumah ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan.
Pada tanggal 23 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH II HULU SUNGAI SELATAN,
TINGKAT II HULU SUNGAI
SELATAN

Cap. Ketua,
ttd.

Cap.

ttd.

S O E D A R N O

DRS.H.SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Selatan dengan
Surat Keputusan :

Nomor : 33/SK-1/KUM
Tanggal : 13 Juli 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu
Sungai Selatan

Nomor : 3
Pada tanggal : 28 Agustus 1995.
Tahun : 1995

Seri : B

Nomor Seri : 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN,

DRS. H. M. ARSYAD
Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI OBYEK WISATA
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN.

I. U M U M

Dalam rangka memantapkan Pembangunan Daerah khususnya dalam sektor Kepariwisata di Daerah, terutama dalam menangani serta mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada, sebagai upaya menyambut dan mendukung program Pemerintah yang menetapkan Daerah Kalimantan Selatan sebagai Daerah tujuan wisata ke XX, kiranya perlu dilaksanakan pembinaan obyek-obyek wisata yang ada untuk mewujudkan Kawasan Wisata sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut diatas, sejalan dengan penyerahan urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, dimana dari 11 urusan didalamnya termasuk urusan Obyek Wisata.

Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Daerah memandang perlu adanya pembenahan, pemeliharaan dan pembinaan terhadap obyek-obyek wisata di Daerah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menjadi suatu wilayah Kawasan Wisata

Dan untuk semua itu, kiranya diperlukan adanya dana yang memadai dalam rangka menunjang tujuan dimaksud yaitu berupa retribusi atas obyek wisata yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas.

....ooOoo....